

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, baik yang disebabkan oleh ulah manusia dan juga kaya akan sumber daya alam. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan)<sup>1</sup>. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa 85% bencana yang terjadi selama lima tahun terakhir ini terjadi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan hidup dan hampir 80% penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana<sup>2</sup>.

Dengan demikian pemerintah Indonesia perlu membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko bencana yang akan terjadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana<sup>3</sup>. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

<sup>1</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, hlm.1

<sup>2</sup> Roni Ekha Putera. 2018. *Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Dari Perspektif Implementasi Kebijakan*. Depok : RajaGrafindo Persada, hal 2

<sup>3</sup> Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008., op.,cit.

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam maupun faktor non alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis<sup>4</sup>. Berikut tabel 1.1 adalah data kejadian bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1

Data Kejadian Bencana Alam di Indonesia Tahun 2015 S/D Tahun 2020

Jenis Bencana	Jumlah	Korban (jiwa)		Rumah (Unit)	
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Rusak Berat	Rusak Ringan
Banjir	3.397	600	2.825	11.741	30.795
Tanah Longsor	2.779	690	620	5.326	5.20
Gelombang Pasang	82	1	5	156	87
Puting Beliung	3.500	106	860	8.312	54.497
Kekeringan	188	0	0	0	0
Kebakaran Hutan & Lahan	745	30	374	1	2
Gempa Bumi	104	683	3.324	84.430	131.311
Tsunami	2	453	14.059	1.583	1.099
Letusan Gunung Api	79	9	68	7	1

Sumber : data dari informasi BNPB (<http://bnpb.cloud/dibi/tabella>) Tahun 2020

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang penanggulangan bencana.

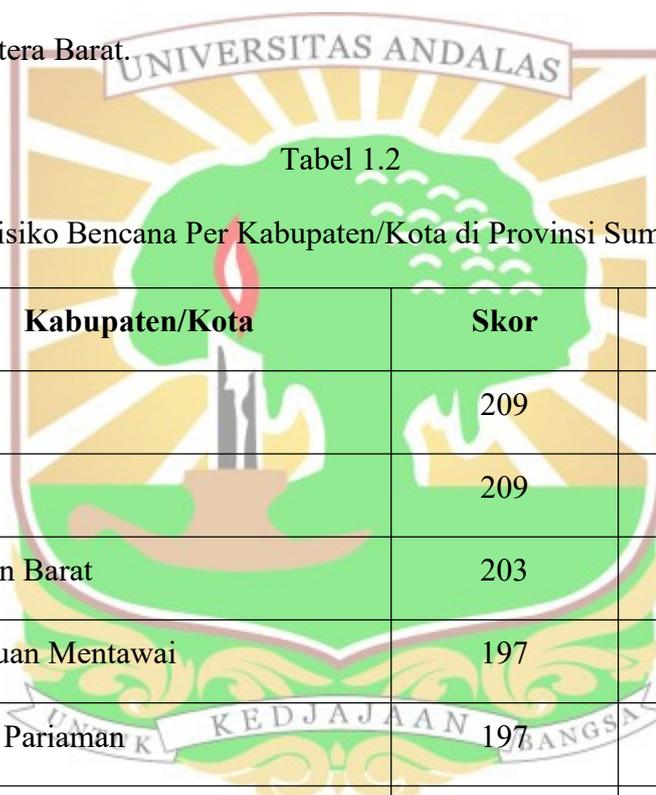
Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa bencana yang pernah terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi juga menelan korban jiwa. Salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana banjir, dimana hampir seluruh wilayah Indonesia menjadi langganan dari bencana banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang memiliki potensi tinggi dan mengakibatkan kerugian yang besar, baik kerugian fisik maupun finansial. Di Indonesia sendiri tercatat memiliki 5.590 sungai induk dan 600 sungai kecil yang berpotensi tinggi menjadi penyebab timbulnya bencana banjir, sehingga daerah rawan banjir di Indonesia mencapai 1,4 juta hektar. Banjir yang melanda daerah-daerah rawan pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, dan penyempitan alur sungai<sup>5</sup>.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 5.131.882 orang dengan luas total wilayah daratan sekitar 42.297,30 Km<sup>2</sup> (4.297.300 ha) yang terdiri atas wilayah pantai dengan dataran sempit di bagian barat. Posisi Sumatera Barat terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi sehingga menyebabkan Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di kawasan ini adalah gempa tektonik, tsunami, gempa vulkanik,

---

<sup>5</sup> Andi Muclis, Analisis Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makas119ar, 2017, hlm. 75-76

longsor, abrasi pantai, badai, kebakaran dan juga banjir. Keberadaan beberapa sungai besar di Sumatera Barat juga berpotensi untuk terjadinya ancaman banjir dan longsor selama musim hujan. Peningkatan risiko bencana yang dipengaruhi perubahan iklim tersebut menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat perlu mensinergikan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka membangun ketangguhan menghadapi bencana. Berikut tabel 1.2 adalah indeks risiko bencana per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.



Tabel 1.2

## Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1.	Padang	209	Tinggi
2.	Agam	209	Tinggi
3.	Pasaman Barat	203	Tinggi
4.	Kepulauan Mentawai	197	Tinggi
5.	Padang Pariaman	197	Tinggi
6.	Pesisir Selatan	190	Tinggi
7.	Pasaman	178	Tinggi
8.	Kota Pariaman	171	Sedang
9.	Dharmasraya	143	Sedang
10.	Kabupaten Solok	137	Sedang
11.	Solok Selatan	137	Sedang

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
12.	Bukittinggi	130	Sedang
13.	Tanah Datar	125	Sedang
14.	Kota Solok	125	Sedang
15.	Lima Puluh Kota	119	Sedang
16.	Padang Panjang	113	Sedang
17.	Sawah Lunto	113	Sedang
18.	Sijunjung	105	Sedang
19.	Payakumbuh	107	Sedang

*Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat 8 diantaranya memiliki kelas risiko besar yang berada pada posisi pertama di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki risiko besar, dan Kota Padang termasuk ke dalam kategori kelas risiko besar serta masuk rentan terhadap bencana yang memberikan dampak cukup besar. Salah satu kejadian yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup besar adalah gempa bumi pada tanggal 30 September 2009. Kejadian gempa bumi juga berdampak kepada Kabupaten/Kota sekitar Kota Padang dengan korban jiwa yang cukup besar. Selain itu bencana lain yang sering terjadi adalah banjir, tanah longsor dan lainnya. Berikut Tabel 1.3 adalah data rekap kejadian bencana yang terjadi di Kota Padang dari tahun 2017-2019 berdasarkan bencana yang sangat berdampak terhadap masyarakat yang diukur dari adanya laporan dari masyarakat.

Tabel 1.3

## Rekap Kejadian Bencana Kota Padang 2017-2019

No	Jenis Kejadian	2017	2018	2019	Jumlah
1.	Banjir	27 kali	30 kali	5 kali	62 kali
2.	Longsor	16 kali	11 kali	8 kali	35 kali
3.	Angin badai	12 kali	5 kali	0 kali	17 kali
4.	Gempa bumi	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali
Jumlah					114 kali

Sumber : data rekapitulasi kejadian bencana tahunan BPBD Kota Padang, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terkait kejadian bencana Kota Padang, maka disimpulkan bahwa banjir merupakan kejadian yang paling banyak terjadi dengan 38 kali. Kejadian ini hampir meliputi seluruh wilayah di Kota Padang. Hal ini dikarenakan banyaknya pemukiman di daerah rendah dan di sepanjang aliran sungai. Kejadian banjir juga memiliki frekuensi kejadian yang hampir terjadi tiap tahun dan mengalami peningkatan kejadian.

Berdasarkan hasil kajian BNPB, Kota Padang merupakan daerah yang rawan banjir dalam 5 tahun terakhir intensitas banjir di Kota Padang semakin tinggi, dalam setiap tahun tidak kurang dari 3 kali kejadian banjir melanda sebagian besar wilayah di Kota Padang. Banjir yang terjadi rata-rata diawali dengan curah hujan yang tinggi secara terus menerus melebihi dari 3 jam merata di seluruh wilayah Kota Padang. Banjir yang terjadi bahkan sudah menelan

korban jiwa dan kerugian serta kerusakan pada asset-asset masyarakat maupun pemerintah dan swasta<sup>6</sup>.

Selain itu berdasarkan Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang di tahun 2019 tercatat 8 kecamatan di Kota Padang mengalami banjir dengan total 13 titik genangan air setinggi 20cm-70cm akibat hujan lebat yang melanda beberapa daerah di Kota Padang. Berikut Tabel 1.4 adalah data Kecamatan yang terendam banjir di Kota Padang<sup>7</sup>.



Tabel 1.4

Data Kecamatan Yang Terendam Banjir di Kota Padang

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Koto Tengah	- Dadok Tunggul Hitam - Jalan Bypass Baiturrahmah
2.	Padang Barat	- Kampung Dadok - Padang Pasir
3.	Padang Utara	- Alai - Khatib Sulaiman - Ulak karang
4.	Lubuk Kilangan	- Koto Hilalang - Bandar Buat
5.	Padang Selatan	- Jondul Rawang
6.	Nanggalo	- Kampung Lapai
7.	Padang Timur	- Jalan Tan Malaka
8.	Lubuk Begalung	- Jalan Aru Upi

*Sumber : olahan peneliti, 2020*

<sup>6</sup> Dokumen Rencana Kontijensi Banjir Kota Padang, hlm. 2

<sup>7</sup> Kompas.com, di akses pada 19 April 2021, 12.11 WIB.  
<https://regional.kompas.com/read/2020/01/10/11281231/banjir-landa-8-kecamatan-di-kota-padang>

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa wilayah Kota Padang yang yang terendam banjir, Kota Padang memiliki 8 Kecamatan yang mengalami banjir dengan total 13 titik. Sejumlah warga di kawasan tersebut mengharapkan pemerintah agar memberikan informasi yang akurat karena jika terjadi banjir masyarakat setempat lebih antisipatif, karena banjir yang terjadi bahkan sudah menelan korban jiwa dan kerugian serta kerusakan pada aset-aset masyarakat maupun pemerintah dan swasta. Berikut Tabel 1.5 adalah rekap kejadian bencana banjir di kota padang tahun 2017-2019.

Tabel 1.5  
Rekap Kejadian Bencana Banjir Kota Padang Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Padang Barat	3	1	0
2.	Padang Utara	4	0	0
3.	Padang Timur	1	3	0
4.	Padang Selatan	8	5	0
5.	Nanggalo	2	1	1
6.	Kuranji	2	8	1
7.	Lubuk Begalung	3	9	1
8.	Lubuk Kilangan	1	1	1
9.	Pauh	1	0	1
10.	Koto Tangah	0	2	0
11.	Bungus Teluk Kabung	2	0	0

*Sumber : Data rekap kejadian bencana tahunan bidang kedaruratan & logistik BPBD Kota Padang*

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa bencana banjir di Kota Padang melanda hampir seluruh Kecamatan di Kota Padang, maka perlu adanya penanggulangan bencana agar mengurangi risiko bencana banjir. Bencana banjir disebabkan oleh debit/volume air yang mengalir pada drainase melebihi kapasitas pengairan yang tersedia, banjir yang terjadi tidak menjadi persoalan bila tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penyebab banjir di Kota Padang adalah pada sistem drainase nya. Hal tersebut disampaikan oleh Rezko staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang ketika survei awal penelitian yang menyatakan bahwa :

“... di Kota Padang ini yang menjadi sumber permasalahan banjir sudah diketahui yaitu buruknya sistem drainase yang ada, dimensi drainase yang tidak memadai, jaringan drainase yang rusak pasca gempa 2009. Nah terkait permasalahan ini BPBD Kota Padang sendiri telah melakukan koordinasi dengan pihak PUPR untuk penyelesaian dari permasalahan drainase ini...”

Dari wawancara di atas terlihat bahwa persoalan penanggulangan bencana banjir tampak semakin berat, sehingga dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindari dari banjir, salah satunya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak menjadikan aliran drainase menjadi tempat pembuangan sampah, perlu disadari bahwa bencana banjir dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, namun kesadaran masyarakat masih kurang terhadap pencegahan bencana banjir. Berikut Gambar 1.1 adalah saluran drainase yang masih tersumbat sampah.

Gambar 1.1

## Saluran Drainase Yang Masih Tersumbat Banjir di Kota Padang



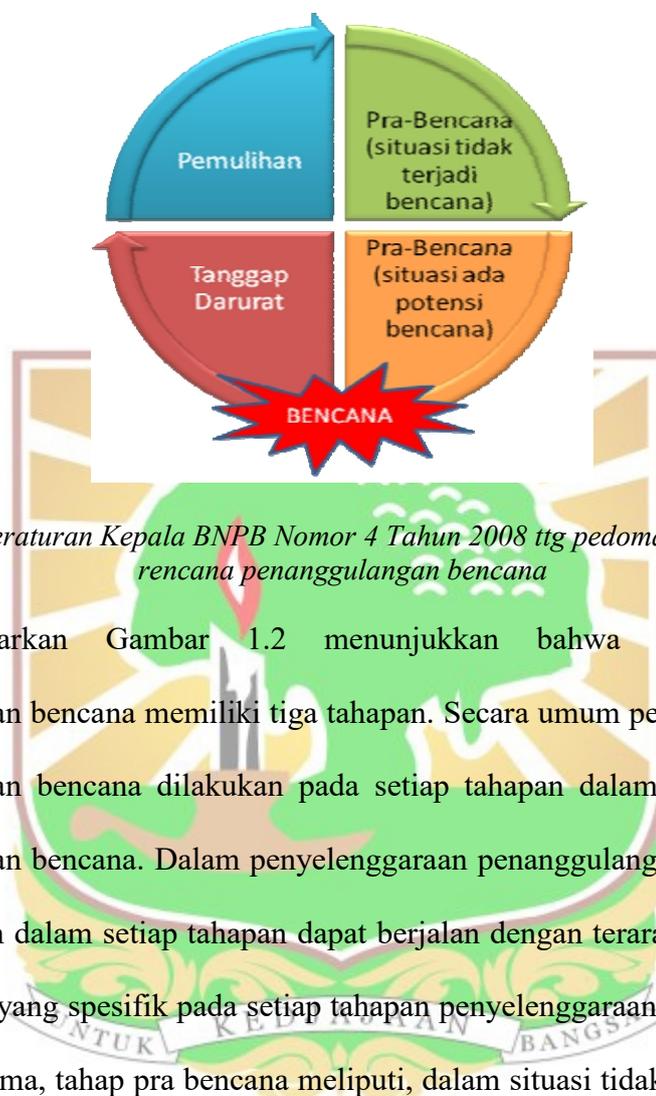
*Sumber : media sosial instagram Pusdalops BPBD Kota Padang*

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa beberapa daerah di Kota Padang masih memiliki saluran drainase dengan kondisi penuh dengan sampah. Dengan demikian, penanggulangan banjir tentu saja dibutuhkan oleh masyarakat, dampak banjir terhadap masyarakat tidak hanya berupa kerugian harta benda dan bangun, selain itu banjir juga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan, terutama kesehatan dan pendidikan.

Dari permasalahan tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Berikut Gambar 1.2 adalah Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana.

Gambar 1.2

## Siklus Penanggulangan Bencana



*Sumber : Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 ttg pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana*

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki tiga tahapan. Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pertama, tahap pra bencana meliputi, dalam situasi tidak terjadi bencana, dan dalam situasi terdapat potensi bencana. Kedua, tahap saat tanggap darurat. Ketiga, pada tahap pemulihan atau pasca bencana.

Dari persoalan yang telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada tahap pra bencana, karena pada tahapan inilah dapat dilakukan pencegahan dan pengurangan besarnya risiko bencana yang akan menimpa, baik melalui pengurangan ancaman bencana

maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Jadi sangat diperlukan adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bentuk pencegahan dan pengurangan besarnya resiko dari bencana. Pra bencana merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini, sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi besarnya kerugian akibat terjadinya bencana dapat dicegah dengan adanya kesadaran atau kewaspadaan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, maka dibutuhkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dengan dilakukannya kerjasama dalam penanggulangan bencana pada saat pra bencana dengan demikian dapat meminimalisir risiko jatuhnya korban maupun kerugian secara materil pada saat terjadinya bencana banjir.

Dengan demikian tidak banyaknya kerugian yang dialami masyarakat serta tidak adanya korban berjatuh yang diakibatkan oleh bencana alam, maka diperlukan adanya pengurangan risiko bencana pada tahap pra bencana. Penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pra bencana yang dilakukan dengan serius dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, dan jika di tahap ini dilakukan dengan sebaik-baiknya maka 1 USD belanja publik untuk pra bencana dapat menghemat 7 USD dari kerugian akibat terjadinya bencana<sup>8</sup>.

Dasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2014-2019, pada tahap pra bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang khususnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian

---

<sup>8</sup> Roni Ekha Putera, implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Berbasis Mitigasi Bencana di Kota Padang, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, tidak dipublikasikan, 2017, hlm. 18-19

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yang meliputi, upaya pengurangan risiko, pencegahan serta pemberdayaan masyarakat<sup>9</sup>.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi dua situasi pertama, dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi tahapan/bidang kerja kebencanaan. Kedua, dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu maka disusun suatu rencana yang disebut Rencana Kontijensi<sup>10</sup>. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan leading sector dalam penanggulangan bencana, yang hendaknya memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga dapat dipercaya bisa melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Berdasarkan hal tersebut diperlukan visi dan misi untuk menggambarkan tujuan dari BPBD Kota Padang sebagai berikut :

- Visi: Menjadikan Padang kota cerdas bencana.
- Misi: Mewujudkan penanggulangan bencana yang handal dan efektif, serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam penanggulangan bencana

Dalam mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang diperlukan kinerja organisasi yang baik. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan

<sup>9</sup> Dokumen Rencana Strategi BPBD Kota Padang tahun 2014-2019, hlm. II.7-II.8

<sup>10</sup> Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana, hlm. IV.1

menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. Dalam penanggulangan bencana banjir tersebut kinerja organisasi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sebagai koordinator dan lembaga yang berwenang dan bertugas di bidang kebencanaan dituntut untuk bekerja secara optimal menyangkut penanggulangan bencana banjir. Pada hakikatnya setiap organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seberapa besar pencapaian organisasi merupakan gambaran dari kinerja suatu organisasi tersebut. Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang diperlukan adanya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) agar dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah<sup>11</sup>.

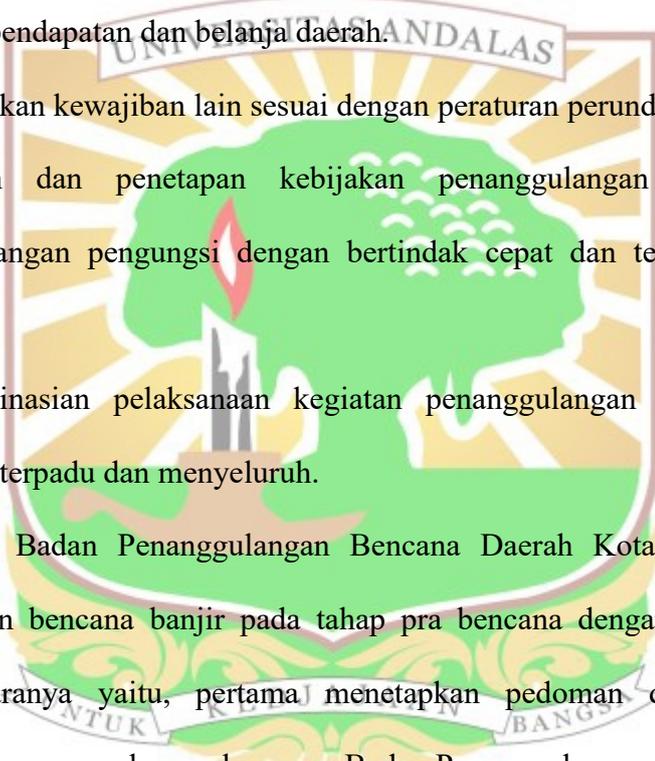
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub bencana), dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang juga menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPBD.

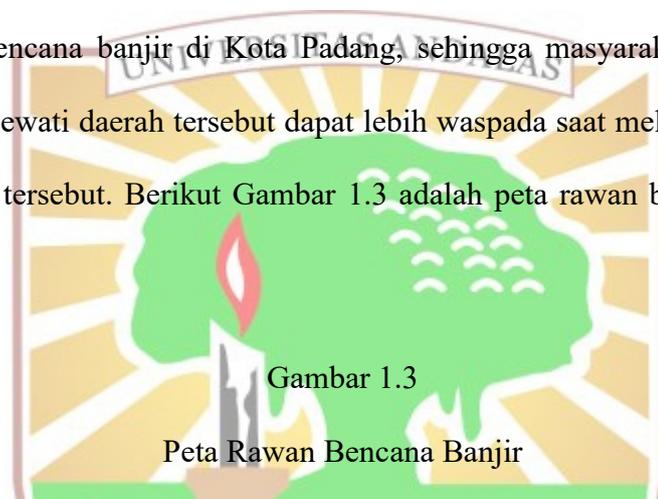
3. Menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan.
9. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
10. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



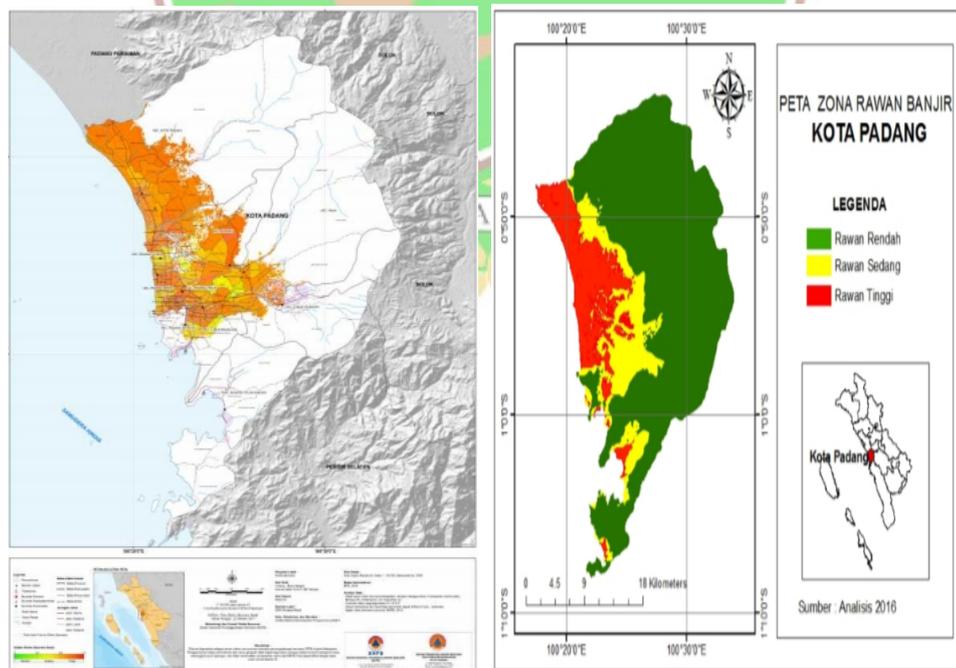
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir pada tahap pra bencana dengan melaksanakan tupoksi diantaranya yaitu, pertama menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam penetapan dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana memiliki Kajian Risiko Bencana (KRB) termasuk bencana banjir. Disusun berdasarkan metode nasional sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman pengkajian risiko bencana yang telah diperbarui dengan menggunakan data tahun 2016. KRB ini dijadikan sebagai pedoman dan pengarahan dalam usaha penanggulangan bencana banjir, serta

memberi gambaran secara spasial dan matrik perhitungan khususnya untuk jumlah korban jiwa terdampak, kerugian rupiah, dan banyak kerusakan lingkungan yang memungkinkan terjadi ketika banjir melanda Kota Padang yang dapat mempermudah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pekerjaannya.

Kedua, menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana. Peta ini difungsikan untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang rawan akan bencana banjir di Kota Padang, sehingga masyarakat Kota Padang yang akan melewati daerah tersebut dapat lebih waspada saat melalui daerah yang terkena banjir tersebut. Berikut Gambar 1.3 adalah peta rawan bencana banjir di Kota Padang.



Gambar 1.3  
Peta Rawan Bencana Banjir



Sumber : dokumen kontijensi bencana banjir Kota Padang tahun anggaran 2017

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa peta rawan bencana banjir memberikan gambaran secara spasial dan khusus terhadap jumlah jiwa terdampak, kerugian rupiah, dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi bila banjir melanda Kota Padang. Kota Padang memiliki kawasan yang rawan akan bencana banjir dari yang memiliki kapasitas rendah yang ditunjukkan dengan warna hijau, kapasitas sedang yang ditunjukkan dengan warna kuning, dan kapasitas tinggi yang ditunjukkan dengan warna merah. Berikut Tabel 1.5 adalah luas area terdampak bahaya banjir di Kota Padang.

Tabel 1.5  
Luas Area terdampak Bahaya Banjir Kota Padang

Kelurahan	Bahaya				
	Luas bahaya (HA)			Total luas	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Koto Tangah	-	149,00	340,83	489,83	Tinggi
Kuranji	-	794,61	17,82	812,43	Tinggi
Lubuk Begalung	-	7,29	371,97	379,26	Tinggi
Lubuk Kilangan	-	52,47	177,84	230,31	Tinggi
Nanggalo	-	419,49	158,85	578,34	Tinggi
Padang Barat	-	61,83	38,97	100,80	Tinggi
Padang Selatan	-	-	97,83	97,83	Tinggi
Padang Timur	-	-	180,27	180,27	Tinggi
Padang Utara	-	67,86	-	67,86	Tinggi
Jumlah	-	1.552,55	1.384,38	2.936,93	Tinggi

Sumber : dokumen kontijensi bencana banjir Kota Padang tahun anggaran 2017

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa luas daerah yang terdampak banjir di Kota Padang dimana tercatat 1.552,55 ha luar daerah yang kapasitas banjir sedang, dan 1.384,38 ha luas wilayah dengan kapasitas banjir tinggi. Peta rawan bencana banjir ini sangat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang untuk memantau daerah-daerah rawan banjir sehingga bisa lebih tanggap dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Prosedur tetap penanganan bencana tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana banjir. Penyusunan prosedur tetap (PROTAP) penanggulangan bencana Kota Padang dimaksudkan untuk memberikan satu dasar tindakan, komando dan pengendalian dari berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terstruktur mampu mengurangi risiko yang memungkinkan timbul akibat bencana. Dari tupoksi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang diharapkan diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian Andre Efroza (2017) tentang Kinerja BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kabupaten Langkat menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam sudah cukup baik, akan tetapi belum maksimal karena masih kurangnya personil, kurangnya peralatan, dan kesulitan untuk mencapai daerah yang terkena bencana untuk

melakukan penanggulangan bencana<sup>12</sup>. Kemudian Syafitri dan Wulandari dalam penelitiannya tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir menyatakan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang setiap tahapan bencana belum maksimal. Selain itu, terdapat kendala dalam merealisasikan kegiatan atau program yang ada diantaranya kekurangan dana, kekurangan SDM terampil di bidangnya, kekurangan sarana dan prasarana, dan masih terdapat miskomunikasi dengan berbagai dinas terkait, dunia usaha, dan masyarakat, kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir<sup>13</sup>.

Merujuk kepada dua penelitian sebelumnya dan pengamatan awal peneliti, peneliti berasumsi bahwa dalam suatu organisasi diperlukan adanya suatu kinerja yang baik dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir yang ada di Kota Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan sifatnya koordinasi dengan seluruh instansi yang ada di Kota Padang. Menurut Wibowo, organisasi dibentuk untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja merujuk kepada keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir.

---

<sup>12</sup> Andre Efoza, *Kinerja BPBD dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Langkat*, Skripsi, Fakultas ISIP, Universitas Medan Area, 2017.

<sup>13</sup> Syafitri dan Wulandari, *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada di dalam latar belakang dan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini merumuskan permasalahan : Bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam Penanggulangan Bencana Banjir?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengembangkan serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti terkait kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir.

